

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP *TAX
AVOIDANCE***

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Dessy Rizqyana

31401800044

**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Usulan Penelitian Skripsi

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP TAX**

AVOIDANCE

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun
2019-2023)**

Disusun Oleh :

Dessy Rizqyana

31401800044

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan sidang panitia ujian Skripsi Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 6 September 2024

Pembimbing



Dr. H. Kiryanto, SE., M.si., Ak,CA

NIK. 211492004

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN
MANAJERIAL TERHADAP TAX AVOIDANCE**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun
2019-2023)**

Disusun Oleh :

Dessy Rizqyana

31401800044

Telah dipertahankan di depan dosen penguji pada tanggal 4 September 2024

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing

Penguji I

Dr. H.Kiryanto, SE., M.Si., Ak, CA

NIK. 211414026

Hani Werdi Apriyanti, SE., M.Si., Ak, CA

NIDN. 0612078902

Penguji II

Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., Ak

NIK. 211492004

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Tanggal 6 September 2024

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, SE., M.Si, PhD, Ak. CA, IFP, AWP

NIK. 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN ARTIKEL

Nama : Dessy Rizqyana
NIM : 31401800044
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Judul : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE***" adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulisan orang lain tanpa menyebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulisan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 7 September 2024

Yang menyatakan



Dessy Rizqyana
31401800044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”

“It will Pass, everything you’ve gone through it will pass”

(Rachel Venny)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT skripsi ini penulis persembahkan kepada:

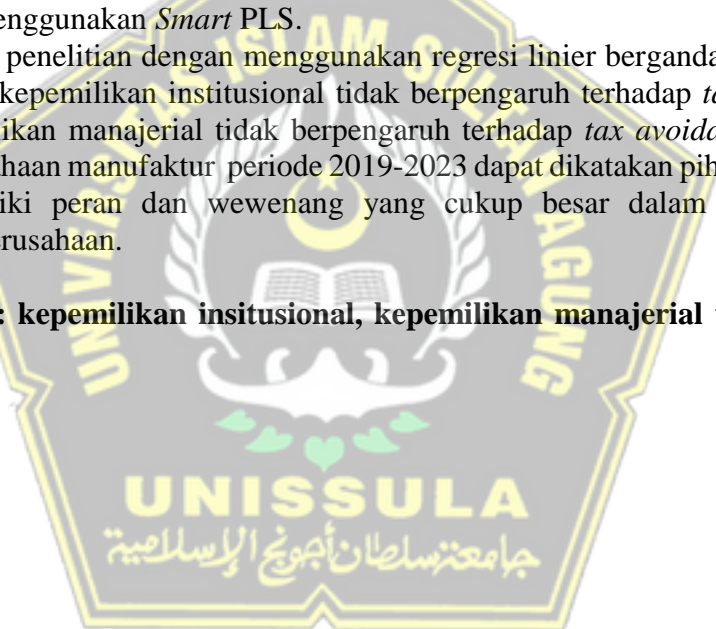
1. Orang tua tercinta saya yang selalu memberikan tauladan, motivasi, pengorbanan, kasih sayang yang tulus, selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
2. Almamater dan civitas FE UNISSULA tempat saya menuntun ilmu yang telah memberikan pembelajaran berharga.
3. Keluarga E1 2018 atas pertemanan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat atas canda, tawa dan dukungan yang telah diberikan.
5. Teman seangkatan dan seluruh keluarga besar UNISSULA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan insitusal, kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* dengan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023 sebanyak 220 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari populasi yang ada terpilih 29 perusahaan manufaktur yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah sampel penelitian adalah 29 perusahaan x 5 tahun= 145 data perusahaan. Pada penelitian ini data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dari catatan-catatan informasi perusahaan yang terkait dengan kebutuhan data. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis pengolahan data penelitian menggunakan *Smart PLS*.

Hasil penelitian dengan menggunakan regresi linier berganda memperoleh hasil bahwa kepemilikan insitusal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, dalam perusahaan manufaktur periode 2019-2023 dapat dikatakan pihak manajerial tidak memiliki peran dan wewenang yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Kata Kunci: kepemilikan insitusal, kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.



ABSTRACT

This research aims to provide empirical evidence regarding the influence of institutional ownership and managerial ownership on *tax avoidance* with a population of 220 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019 - 2023 period. This research uses a purposive sampling technique. From the existing population, 29 manufacturing companies were selected that met the criteria set within a period of 5 years, the total research sample was 29 companies x 5 years = 145 company data. In this research, data was obtained from the Indonesian Stock Exchange (BEI) and from company information records related to data needs. The analysis used is multiple linear regression analysis. Analysis of research data processing using Smart PLS.

The results of research using multiple linear regression show that institutional ownership has no effect on *tax avoidance*. And managerial ownership has no effect on *tax avoidance*. This means that in manufacturing companies for the 2019-2023 period it can be said that the managerial side does not have a large enough role and authority in making company decisions.

Keywords: *institutional ownership, managerial ownership of tax avoidance.*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panajatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan usulan penelitian Skripsi yang berjudul “PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE*” ini dapat terselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh derajat sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Rosulullah SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Heru Sulistyono, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., PhD, Ak. CA, IFP, AWP selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Kiryanto, SE., M.Si., Ak, CA selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan serta semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi atas kerja sama dan bantuannya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Orang tua tercinta yang telah mendoakan, memberikan kasih sayang dan selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Adik dan keluarga besar saya yang telah memberikan support kepada saya.
7. Bripda Bagas Hafizh Iftinanyas, orang yang selalu ada memberikan dukungannya, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi

banyak dalam penulisan skripsi ini, dan terima kasih telah menjadi bagian perjalanan hingga penyusunan skripsi ini.

8. Nisa, Amel, dan Winda, terima kasih atas motivasi dan kebaikan selama ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 7 September 2024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory).....	10
2.2 Variabel Penelitian	11
2.2.1 <i>Tax Avoidance</i>	11
2.2.2 Kepemilikan Institusional	12
2.2.3 Kepemilikan Manajerial	14
2.3 Penelitian Terdahulu.....	15
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	19
2.4.1 Pengembangan Hipotesis	19
2.4.1.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	19
2.4.1.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax Avoidance</i>	20
2.4.2 Kerangka Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Populasi dan Sampel.....	22

3.3	Sumber dan Jenis data	23
3.4	Metode pengumpulan Data.....	23
3.5	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	24
3.6	Teknik Analisis Data	25
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	25
3.6.3	Uji Analisis Data.....	26
3.6.3	Model Pengukuran atau Outer Model	28
3.6.4	Model Struktural atau Inner Model	30
3.6.5	Pengujian Hipotesis	30
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1	Hasil Penelitian	32
4.1.1	Populasi dan Sampel	32
4.2	Analisis Data	33
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	33
4.3	Evaluasi Model Pengukuran.....	34
4.4	Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	36
4.4.1	Penilaian <i>R-Squares</i>	36
4.5	Uji Hipotesis.....	37
4.6	Pembahasan.....	38
4.6.1	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	38
4.6.2	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax Avoidance</i>	40
BAB V	PENUTUP	41
5.1	Kesimpulan	41
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	41
5.3	Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA		43
LAMPIRAN.....		45

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	24
Tabel 4. 1 Hasil Seleksi Sampel.....	32
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	33
Tabel 4. 3 Outer Loadings.....	35
Tabel 4. 4 Composite Reliability	35
Tabel 4. 5 R- Square.....	36
Tabel 4. 6 Outout Path Coefficients.....	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gambar Kerangka Pemikiran	21
Gambar 3. 1 Model Empiris	28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Populasi Penelitian	46
Lampiran 2 Daftar Sampel	52
Lampiran 3 Daftar Perusahaan yang menjadi Objek Penelitian	53
Lampiran 4 Data Kepemilikan Manajerial.....	56
Lampiran 5 Data Tax Avoidance	59
Lampiran 6 Analisis Statistik Deskriptif.....	62
Lampiran 7 Outer Loading.....	62
Lampiran 8 Composite Reliability.....	62
Lampiran 9 R- Square	63
Lampiran 10 Output Path Coefficients.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang aktif berkembang di berbagai bidang. Bidang konstruksi akan memakan waktu yang cukup banyak uang. Menurut Pasal 1(1) Undang-Undang No 16/2009 tentang aturan umum dan prosedur perpajakan, pajak adalah investasi wajib di suatu negara yang dibuat oleh seseorang atau organisasi, yang dipaksa oleh hukum tanpa remunerasi langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk mengisi orang secara maksimal.

Pajak merupakan salah satu investasi utama dalam meningkatkan pembangunan negara. Merangkul kehidupan orang. Bangsa dan negara secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan negara yang sama. Pajak memainkan peran penting dalam kehidupan negara justru untuk pembangunan negara, karena pajak dianggap sebagai sumber pendapatan negara terbesar untuk memenuhi kebutuhan biaya pembangunan dan pengeluaran biasa. Salah satu tujuan pembangunan negara di Indonesia adalah menciptakan kebahagiaan manusia dengan berfokus pada pengembangan pendidikan, kedokteran, ekonomi, infrastruktur, dll. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mengembangkan negara dari Daftar Penerimaan Negara (APBN). (Haloho, 2021)(Astuti dan Aryani, 2017).

Sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi APBN. Meskipun negara ini masih memiliki banyak sumber lain (misalnya gas alam, minyak dan penerimaan anggaran pendapatan dan anggaran pendapatan negara-negara asing (PNBM) dalam bentuk bantuan luar negeri). Pajak perusahaan merupakan beban

yang mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan berusaha mengurangi pajak mereka seminimal mungkin. Namun, penerimaan pajak negara merupakan kebutuhan mendesak untuk pembangunan Indonesia. Perbedaan suku bunga ini membuat pajak menjadi beban dan kewajiban, dan dengan karakteristik tersebut dapat menyebabkan wajib pajak menghindari *tax avoidance* yang legal dan ilegal. (Situmorang dan Anastasia, 2021).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), saat mencatat penerimaan negara www.bps.go.id 2021, terlihat bahwa pendapatan terbesar berasal dari penerimaan pajak sebesar 1.541,84 triliun Rs dengan 77,15% dari total pendapatan. Penerimaan pajak pada tahun 2021 meningkat sebesar Rs 1,285.51 triliun pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi pajak yang dipungut pemerintah, semakin meningkatkan penerimaan negara untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak dilakukan dengan mereformasi aturan umum pajak pada tahun 1983. Sistem penilaian mandiri akan efektif jika masyarakat secara sukarela mematuhi standar yang ada. Reformasi signifikan dan sistem penilaian mandiri Meningkatkan ekspektasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela dan sesuai dengan undang-undang perpajakan saat ini. Namun, bukti praktis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di masyarakat masih rendah. Ini menghambat pendapatan pajak negara. Jika warga negara dapat mematuhi aturan pajak, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan pajak di negara tersebut. (Vinarsich, 2015).

Namun, masih banyak kendala upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya masih ada perusahaan yang mengambil langkah *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak. *Tax avoidance* (Menghindari) merupakan salah satu upaya *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum dalam rangka mengurangi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang. (Yusman & Knock, 2020) Sementara itu, kata Hakim Reddy dalam kasus *American McDowell and Co.* Menghindari ini adalah seni menghindari membayar pajak tanpa melanggar hukum. Namun, langkah *tax avoidance* ini mengeksploitasi peluang dan celah dalam kerangka pajak. (Yusman & Knock, 2020).

Perusahaan di sektor makanan dan minuman adalah contoh perusahaan yang mencoba terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Permasalahan berawal dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), membuat perusahaan baru, kemudian mengalihkan layanan, alat, dan kegiatan departemen mie kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP www.gresnews.com).

Menurut Laporan Keadilan Pajak 2020 : Keadilan Pajak selama COVID-19, sikap Indonesia terhadap kasus *tax avoidance* oleh wajib pajak badan dan orang pribadi menempati urutan keempat di Asia setelah Cina, India, dan Jepang. Menurut situs web www.tribunnews.com , fenomena yang dilaporkan oleh Tax Justice Network Institute adalah bahwa perusahaan tembakau yang dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) melalui PT Bantoel American Tobacco (BAT) terlibat dalam penggelapan pajak di Indonesia, yaitu menarik sebagian dari hasil mereka

dari Indonesia melalui pinjaman domestik dan mengembalikannya ke Inggris dalam bentuk royalti, biaya dan layanan.

Fenomena *tax avoidance* yang lebih sensitif dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang pada pertengahan Juni 2021 diduga menyelewengkan produk emas senilai Rp 47,1 triliun dengan melakukan penukaran kode impor. Tujuan pertukaran kode impor adalah untuk menghindari pajak impor dan pajak penghasilan. (PPh) karena tugas manajemen dan informasi yang tidak akurat. Kerusakan yang ditimbulkan pada pemerintah dari kasus ini diperkirakan mencapai 2,9 triliun rupee (Kata.data.co.id 2021).

Ini adalah peluang besar bagi perusahaan untuk memanfaatkan praktik penghindaran pajak. Monitor) sangat diperlukan. Monitor Ini adalah sistem administrasi dan manajemen yang digunakan untuk mengelola perusahaan dengan lebih baik. Monitor Ini juga mengharuskan perusahaan untuk mengadopsi aturan dan kebijakan saat membuat keputusan sehingga mereka dapat dipantau, ditegakkan, dan dimintai pertanggungjawaban atas kinerja mereka. Monitor Memastikan bahwa rencana pengurangan beban pajak perusahaan tetap tunduk pada *tax avoidance* (Menghindari) daripada penggelapan pajak (Penghindaran pajak) adalah ilegal. (Lucy dan Panggabean, 2018).

Monitor Bagaimana Lembaga Tata Kelola Perusahaan Indonesia Sistem, struktur, dan proses organisasi perusahaan memberikan nilai tambah untuk waktu yang lama. Tata kelola perusahaan yang baik diperlukan untuk menghindari pembayaran pajak perusahaan Tata kelola perusahaan yang baik Tata kelola atau pengawasan perusahaan Sistem pemrosesan dan manajemen perusahaan kerangka

Monitor Menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur penetapan kebijakan harus dikembangkan dan dilaksanakan untuk sepenuhnya mempertimbangkan dan mengimplementasikan tujuan Perusahaan dan untuk memantau operasi Perusahaan. (Haloho, 2021).mekanisme Tata kelola perusahaan yang baik Ini termasuk kepemilikan institusional, manajemen perguruan tinggi, komisi independen, komite audit dan peninjau kualitas.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham di perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan non-bank yang memegang uang atas nama orang lain, seperti dana investasi. Kepemilikan kelembagaan penting untuk kontrol manajemen, karena keberadaan kepemilikan kelembagaan berkontribusi pada peningkatan pengawasan dengan cara yang lebih tepat. Audit tentu membawa kemakmuran bagi pemegang saham, karena pengaruh kepemilikan kelembagaan sebagai regulator ditekan oleh investasi signifikan mereka di pasar modal. (Pratomo dan Risa Aulia Rana, 2021).

Mereka percaya bahwa pemilik organisasi dapat memaksa manajer untuk fokus pada efisiensi ekonomi dan menghindari kemungkinan perilaku egois atau egois. Sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan, pemilik organisasi harus membeli insentif untuk manajemen. Menurut Shleifer dan Vishney pada tahun 1998 (Mulyani et al., 2018), penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo & Pramuka, 2018) dan (Mulyani et al., 2018) menunjukkan bahwa kepemilikan kelembagaan memiliki dampak yang signifikan. Melawan *tax avoidance*

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan eksekutif. Kepemilikan eksekutif adalah tingkat keterlibatan pihak senior yang

terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, seperti direktur, CEO dan Komisaris. Peran manajemen yang berpengaruh Manajemen Manajemen Perusahaan manajemen memiliki peran tidak hanya manajer, tetapi juga pemegang saham. Hal ini membuat manajer lebih aktif dalam memenuhi ekspektasi pemegang saham (F. Jumianti dan Dwi, 2014). Penelitian oleh Adriyanti dan Nadia (2019), N.S. fadhila et al. (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan eksekutif memiliki dampak positif. Sementara itu, penelitian Prasetyo dan Pramuka (2018), Adisti (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan eksekutif tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Penghindaran pajak

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba mengeksplorasi *tax avoidance* dengan variabel independen, kepemilikan institusional, kepemilikan eksekutif dan dampaknya terhadap perusahaan manufaktur dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

1.2. Rumusan Masalah

Menurut (Sari et al., 2021), *tax avoidance* merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang terutang kepada pemerintah. Pajak adalah pengurangan keuntungan yang tidak dianggap menguntungkan bagi perusahaan mana pun, tetapi pajak adalah modal terbesar negara. *Tax avoidance* pasti akan mempengaruhi besaran penerimaan APBN dan mempengaruhi stabilitas negara dan pembangunan negara. Banyaknya langkah *tax avoidance* yang diterapkan oleh perusahaan Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kecurangan pajak. Hal tersebut salah keduanya seperti, kepemilikan institusional

dan kepemilikan manajerial. Selain itu dengan adanya pengaruh pengungkapan *corporate governance* diharapkan mampu untuk membangun reputasi yang baik bagi masyarakat dengan dimilikinya *good corporate governance* yang tinggi. Hal ini tentu bertentangan dengan langkah-langkah penghindaran pajak, yang akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga, berdasarkan latar belakang diatas, maka akan diangkatlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh kepemilikan institusional terhadap terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengukur secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengukur secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

a. Bagi Peneliti

Peneliti ini diharapkan dapat memperoleh manfaat dari pengalaman berharga dalam menerapkan ilmu akuntansi pajak yang dipelajari di universitas, dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi di masa depan dalam studi yang sama yang akan dijadikan acuan untuk

meningkatkan kesadaran perpajakan, khususnya dalam urusan perusahaan.

b. Bagi Akademisi

Manfaat penelitian ini bagi para ilmuwan dapat menjadi tambahan materi dan wawasan sekaligus sebagai alat pengembangan ilmu akuntansi perpajakan. Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian di masa depan.

Penelitian ke depan diharapkan dapat memberikan sumber daya dan informasi kepada pihak-pihak yang ingin meningkatkan dan memperluas penelitiannya mengenai *tax avoidance*.

2. Aspek Praktis

a. Manfaat bagi perusahaan

Untuk perusahaan yang terdaftar di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat membantu manajer mengetahui tanggung jawab apa yang harus dipertimbangkan dalam operasional perusahaannya.

b. Manfaat bagi pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan dari kajian tersebut untuk mengevaluasi, menginformasikan dan mengevaluasi atau merumuskan kebijakan pembayaran pajak perusahaan.

c. Manfaat bagi perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan referensi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian lebih lanjut atau yang akan berpartisipasi dalam penelitian ini di masa mendatang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Jensen & Meckling (1976) · Astuti dan Aryani, (2017)

Teori agensi menjelaskan hubungan antar pemegang saham sebagai berikut: dokter dan manajemen. Teori keagenan adalah kolaborasi antar manajer sebagai kontraktor untuk bekerja bagi pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976 Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015) Pemegang saham (dokter) Pengalihan manajemen perusahaan kepada ahli (Agen) untuk mencapai atau melampaui tujuan yang ditetapkan dan mendapatkan keuntungan maksimal dengan cara yang menguntungkan. (Astuti dan Aryani, 2017)

Pertanyaan tentang konflik keagenan antara pemegang saham (pemilik bisnis) dan calon manajer akan muncul ketika manajemen tidak memiliki mayoritas saham perusahaan. Pemegang saham tentu ingin manajer bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Manajer perusahaan dapat bertindak bukan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Konflik kepentingan muncul ketika wali amanat dan perwakilan prinsipal memiliki akses terhadap informasi internal perusahaan sebagai pemilik modal dan agen adalah agen yang mengarahkan operasional perusahaan.

Terjadinya *tax avoidance* dipengaruhi oleh permasalahan agen. Masalah instansi akibat *tax avoidance* terkait dengan perbedaan manfaat, di satu sisi, agen menginginkan kompensasi lebih dari keuntungan yang dihasilkan dalam menghilangkan risiko jangka panjang perusahaan yang disebabkan oleh penghindaran pajak, di sisi lain, prinsipal menginginkan beban pajak yang rendah tanpa mengorbankan keberadaan perusahaan.

Menurut lembaga tersebut, masalah pengendalian internal tindakan *tax avoidance* tidak selalu sama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tergantung pada manajemen (agen). Saat melakukan operasi, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori tata kelola perusahaan didasarkan pada teori keagenan, di mana manajemen suatu perusahaan harus diawasi dan diatur untuk memastikan bahwa manajemen sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku (Hanum, 2013, Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018). Ada kemungkinan bahwa mereka hanya tertarik pada kepentingan mereka sendiri, akibatnya masalah dengan agensi muncul. Kepemilikan yang dapat dikelola adalah jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen suatu perusahaan dalam kaitannya dengan total modal yang dikelola (Gideon 2005).

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Tax Avoidance

Tax Avoidance sebagai upaya *tax avoidance* yang ditujukan untuk mengurangi utang pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak, karena

tidak melanggar aturan perpajakan yang menggunakan metode dan teknik, mereka sering memanfaatkan celah aturan pajak (fadrianto). Menghindari Hal ini dapat dilakukan dengan mengukur menggunakan beberapa metode pengukuran. Salah satunya adalah Tarif pajak efektif (ETR) pengeluaran Tarif pajak efektif (ETR) dapat menghitung kemungkinan perusahaan akan mencoba menghindari pajak. Metode yang digunakan adalah 1 dikurangi jumlah kewajiban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. (Mahdiana dan Amin, 2020)

Sementara itu, menurut (Pohan 2016) (Nugraha dan Mulyani 2019), *tax avoidance* (Menghindari) adalah upaya *tax avoidance* yang dilakukan secara legal dan aman dalam rangka mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada wajib pajak, karena tidak melanggar aturan perpajakan. (Anita Vijajanti, Endang Masitoh, 2018) Metode dan teknik cenderung menggunakan celah yang tercatat dalam aturan pajak itu sendiri. Menghindari Hal ini juga merupakan salah satu bentuk perencanaan pajak, namun dapat dihindari jika wajib pajak berusaha mendapatkan manfaat pajak dengan cara yang bertentangan dengan aturan. (Adivah dan Arif 2020)

Di satu sisi, *tax avoidance* diperbolehkan oleh undang-undang jika sesuai dengan ketentuan undang-undang saat ini, di sisi lain, *tax avoidance* tidak diperbolehkan, karena dianggap merugikan penerimaan negara. Tujuan utama *tax avoidance* perusahaan adalah jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan untuk membayar pajak, pemotongan atau pengalihan untuk membayar biaya perusahaan lainnya (Mahdiana & Amin, 2020).

2.2.2 Kepemilikan Institusional

Corporate governance digunakan untuk mewujudkan kepentingan jangka panjang para pemangku kepentingan. Mengingat nilai-nilai etika bisnis yang baik. Tata kelola perusahaan bersifat sistematis. Proses dan struktur mengatur bentuk hubungan yang harmonis antara manajer. Pemilik, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Ini digunakan untuk mengelola, mengelola, dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan pengembangan bisnis dan akuntabilitas yang transparan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memenuhi kewajiban kami terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Prasetyo dan Pramuka, 2018).

Perusahaan yang mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik akan berdampak positif pada operasionalnya, dan kinerja perusahaan bagi pemangku kepentingan akan lebih efisien dan efektif, termasuk dalam merumuskan kebijakan perpajakan.

Husnans pada tahun 2001 (Prasetyo & Pramuka, 2018) menekankan bahwa ada dua jenis kepemilikan di perusahaan Indonesia: perusahaan yang dimiliki bersama dan perusahaan kepemilikan terpusat. Perusahaan dengan kepemilikan yang luas menawarkan lebih banyak imbalan kepada manajer. Perusahaan yang dimiliki secara terpusat memiliki dua kelompok pemegang saham: pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Teori keagenan ini berkembang ketika ada kontrak antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsip). Manajer mengetahui keadaan perusahaan lebih baik daripada pemiliknya. Oleh karena itu, manajer berkewajiban untuk memberi tahu pemilik perusahaan. Namun, informasi yang dikirim terkadang tidak sesuai dengan situasi aktual di perusahaan. (informasi

asimetris) untuk memastikan konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsip). Ini memerlukan biaya agensi.

Kepemilikan organisasi adalah kepemilikan saham badan hukum. Lembaga keuangan negara, lembaga asing (Ngadiman dan Puspitasari, 2014 (Kurnianti, 2021)

Lim menjelaskan pada tahun 2011 (Prasetyo & Pramuka, 2018), bahwa kegiatan pemegang saham yang lebih besar daripada pemilik institusional meningkatkan efektivitas *tax avoidance* pemegang saham, di mana pemegang saham mayoritas pemegang saham institusional mengintervensi manajemen untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan badan dan meningkatkan aset mereka. Akuntabilitas kelembagaan memainkan peran penting dalam pengawasan, disiplin, dan manajemen dampak. Kebijakan pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh ukuran aset konstitusionalnya. Semakin banyak aset konstitusional mengurangi kebijakan pengurangan pajak, sebaliknya, semakin sedikit aset konstitusional yang ditingkatkan oleh kegiatan *tax avoidance* (Aprianto & Dwimulyani, 2019).

2.2.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan ekuitas manajer (direksi dan komisaris) yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan eksekutif adalah situasi di mana ada dua peran antara manajer dan pemegang saham, atau bisa juga disebut kepala perusahaan yang memiliki saham perusahaan. Kepemilikan manajemen adalah tingkat kepemilikan saham manajemen perusahaan, yang secara aktif berpartisipasi dalam mengambil keputusan tentang kegiatan perusahaan. Semakin tinggi pangsa saham eksekutif perusahaan, semakin

banyak dewan akan mendukung pemegang saham. Karena ketika ada keputusan yang salah, menurut teori agensi, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham menyebabkan konflik, yang sering disebut konflik agensi.

Menurut Cristiawan (Kalbuana et al., 2017), kepemilikan eksekutif adalah situasi di mana manajer memiliki saham perusahaan, atau, dengan kata lain, manajer juga merupakan pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, situasi ini dinyatakan dalam hal persentase kepemilikan saham manajer.

Keputusan bisnis manajer adalah keputusan yang ditujukan untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan. Bukan untuk kepentingan pemegang saham. Kepemilikan manajemen adalah jumlah saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan.

Kepemilikan eksekutif adalah persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajer, diukur dengan penyajian saham biasa yang dimiliki oleh manajer yang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Prasetyo & Pramuka, 2018). Pemegang saham dan manajer tertarik untuk memaksimalkan tujuan mereka. Masing-masing pihak memiliki risiko yang terkait dengan tugasnya, manajer berisiko tidak ditunjuk sebagai manajer jika tidak memenuhi tugasnya, sementara pemegang saham dapat kehilangan uang jika mereka memilih manajer yang salah (Sumantri et al., 2018).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian sebelumnya yang menjadi dasar para peneliti. Di bawah ini adalah gambaran umum dari penelitian sebelumnya dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Sagita Feby Riskina Haloho 2021	<p>a. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>b. Variabel Independen : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan <i>Leverage</i>.</p>	1. Kepemilikan institusional tidak berdampak signifikan pada penghindaran pajak.
2.	Deanna Puspita, Meiriska Febrianti 2018	<p>a. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>b. Variabel Independen : Kepemilikan Manajerial dan Konservatisme Akuntansi</p>	1. Kepemilikan eksekutif memiliki dampak yang signifikan. Melawan penghindaran pajak
3.	Vidya Vitta Adhivinna 2017(Prastiyanti & Mahardhika, 2022)	<p>a. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p>	1. Kepemilikan eksekutif memiliki efek

		b. Variabel Independen : <i>Return On Asset, Leverage,</i> Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan.	positif pada penghindaran pajak.
4.	Sinta Prastiyanti, Arya Samudra Mahardika 2022	a. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> b. Variabel Independen : Kepemilikan Manajerial, <i>Firm Size,</i> dan Profitabilitas	1. Kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak.
5.	Putri Miftah Fajarani 2021	a. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> b. Variabel Independen : Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Komite Audit.	2. Kepemilikan eksekutif berdampak negatif pada ETR.
6.	Wildan Dwi Lastyanto, Doddy Setiawan 2022	a. Variabel Dependen : Penghindaran Pajak b. Variabel Independen : Kepemilikan Institusional.	1. Partisipasi kelembagaan memiliki dampak yang signifikan. Melawan

			penghindaran pajak
7.	Bornok Situmorang, Vivian Anastasia 2021	<p>a. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>b. Variabel Independen : Kepemilikan Manajerial, <i>Leverage</i>, Dan Profitabilitas</p>	1. Kepemilikan eksekutif memiliki dampak yang signifikan. Melawan penghindaran pajak
8.	Adisti Maharani Krisna 2019	<p>a. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>b. Variabel Independen : kepemilikan Institusional dan kepemilikan manajerial</p> <p>c. Variabel Moderasi : Kualitas Audit</p>	1. Kepemilikan kelembagaan memiliki dampak yang signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak.
9.	Isykarima Khaleda Zia, Budi Pratomo, Kurnia Kurnia 2018	<p>a. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>b. Variabel Independen : Kepemilikan institusional dan <i>multinationality</i>.</p>	Kepemilikan cabang eksekutif tidak memiliki dampak parsial yang signifikan terhadap

		c. Variabel Moderasi : <i>firm size</i> dan <i>leverage</i>	penghindaran pajak.
10.	Budi Pratomo Risa Aulia Rana 2021	a. Variabel Dependen : Penghindaran Pajak b. Variabel Independen : Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit	1. Kepemilikan institusional berdampak negatif pada penghindaran pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengembangan Hipotesis

2.4.1.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

adalah persentase saham yang dimiliki oleh entitas lain, seperti bank, pemerintah, dan perusahaan asuransi. Saham institusional digunakan untuk melacak kinerja manajemen perusahaan. Organisasi ini menginginkan perusahaan meningkatkan produktivitas, termasuk pajak, tetapi tidak bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku.

Menurut penelitian, (Mita Devi, 2019) telah mencapai hasil yang berdampak signifikan terhadap kepemilikan institusi. Menghindari Selanjutnya (Putri, Lawita 2019), penelitian yang dilakukan menghasilkan hasil yang sangat dipengaruhi oleh tanggung jawab kelembagaan. Menghindari Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin tinggi pangsa saham yang dimiliki oleh organisasi, semakin positif dan

bermakna praktik tersebut. Menghindari Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 = Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

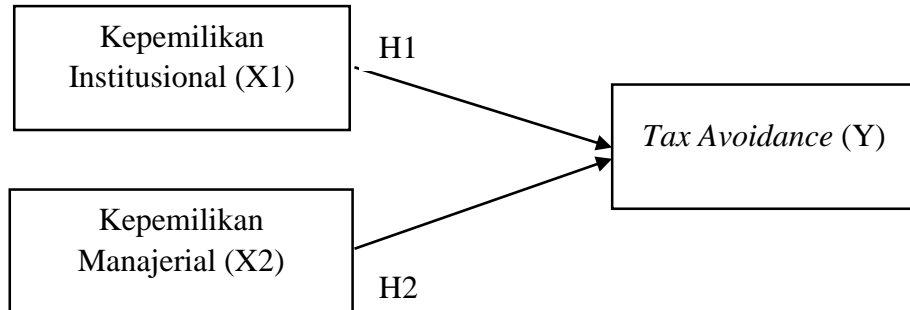
2.4.1.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial adalah persentase saham di perusahaan yang dimiliki oleh manajer. Kepemilikan saham manajer memungkinkan manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena manajer bertindak sebagai pemilik pada saat yang sama, manajer fokus pada semua konsekuensi yang datang dengan membuat keputusan, seperti keputusan terkait pajak. Namun, hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang saat ini.

Menurut penelitian, (Haloho, 2021) telah mencapai hasil yang secara material dipengaruhi oleh kepemilikan dewan. Menghindari Kemudian studi tentang Sinta Prastiyanti dan (Prastiyanti dan Mahardhika, 2022) telah mencapai hasil yang secara material dipengaruhi oleh kepemilikan dewan. Hindari Hal ini karena persentase saham yang lebih tinggi yang dimiliki oleh manajer akan berdampak negatif pada operasional. Menghindari Hal ini terjadi karena manajer tidak ingin citra perusahaannya memburuk. Oleh karena itu, hipotesis kedua dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 = Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.2 Kerangka Penelitian



Gambar 1 Gambar Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme. Ini digunakan untuk mempelajari populasi atau spesimen tertentu. Data dikumpulkan menggunakan alat penelitian yang menganalisis data kuantitatif/statistik dalam bentuk numerik untuk menguji hipotesis spesifik. (Sukijono, 2019).

Bagaimana (Sukijono, 2019) Strategi pemecahan masalah yang digunakan dalam artikel ini menggunakan cara biasa membangun masalah asosiasi hubungan, yang melihat pengaruh hubungan kausal dan hubungan kausal variabel independen pada variabel dependen.

3.2 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini Antara tahun 2019 dan 2023, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI cukup luas untuk dijadikan sampel penelitian.

Sebuah contoh dapat dipahami sebagai bagian dari populasi dengan karakteristik tertentu. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah target sampling. Pengambilan sampel target menyiratkan bahwa kriteria tertentu yang terkait dengan audiens diperhitungkan saat menentukan pengambilan sampel yang representatif. Kriteria khusus yang ditetapkan selama proses pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 31 Desember, Perseroan mengumumkan laporan keuangan dan laporan tahunan untuk tahun 2019-2023. Terus-menerus.
2. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan periode 2019-2023
3. Perusahaan memiliki aset manajernya.
4. Perusahaan memiliki kepemilikan institusional.
5. Perusahaan yang menguntungkan

3.3 Sumber dan Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi sekunder, yaitu informasi yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui alat mediasi yang ada atau dari dokumen yang ada. Sumber penelitian berasal dari laporan tahunan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023, terkait variabel penelitian. Data riset tersedia di situs resmi Bursa Efek Indonesia. (www.idx.co.id) dan di situs web perusahaan yang masuk dalam Daftar BEI pada tahun 2021-2023.

3.4 Metode pengumpulan Data

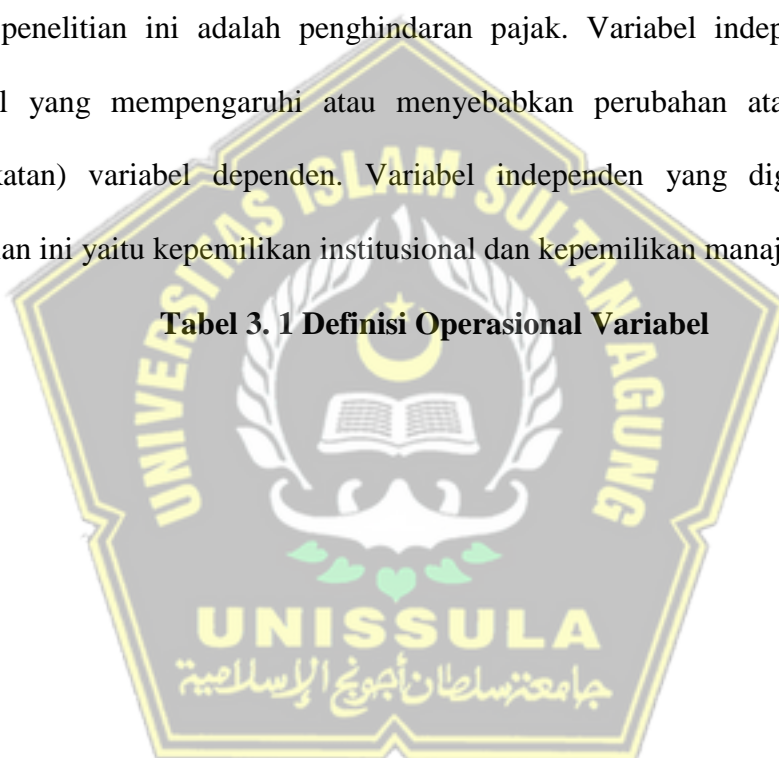
Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumen. Metode ini dilakukan dengan mengambil data dari register data perusahaan sehubungan dengan kebutuhan data peneliti. Materi dapat dilakukan dalam bentuk kajian sastra menggunakan majalah. Laporan tahunan, buku, dan studi sebelumnya untuk mendapatkan metode teoritis dan analitis untuk memecahkan masalah. Dokumen ini berasal dari laporan keuangan perusahaan

manufaktur untuk tahun 2019-2023 yang diperoleh melalui website BEI (www.idx.co.id) atau informasi perusahaan terkait data penelitian.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang mempengaruhi atau memiliki konsekuensi karena ada variabel independen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau munculnya (pengikatan) variabel dependen. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel



No	Variabel	Definisi	Indikator Pengukuran
1.	<i>Tax Avoidance</i> (Y)	Pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan metodologi CETR ketika membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi beban pajak dalam jangka waktu tertentu, semakin perusahaan akan menghindari pajak. (Mahdiana dan Amin, 2020).	Ini digantikan oleh CETR, yaitu pembayaran beban pajak secara tunai dibagi dengan laba sebelum pajak. $\text{CETR} = \frac{\text{Total beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$
2.	Kepemilikan Institusional (X1)	Kepemilikan Institusional diukur sebagai persentase dari jumlah saham yang dimiliki oleh organisasi dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar (Haloho, 2021)	Kepemilikan Institusional dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : $\text{KI} = \frac{\text{Saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}}$
3.	Kepemilikan Manajerial (X2)	Kepemilikan manajerial diukur sebagai persentase dari jumlah saham yang dimiliki oleh direksi dan komite berdasarkan jumlah saham yang beredar (Haloho, 2021)	Variabel Kepemilikan Manajerial diukur menggunakan rumus sebagai berikut : $\text{KM} = \frac{\text{Saham yang dimiliki manajerial}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}}$

3.6 Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data menggunakan program komputer, yaitu structural equation models (SEM), dan perangkat lunak, termasuk partial smaller squares (PLS) atau intelligent PLS, merupakan metode analisis yang efektif dan sering disebut sebagai soft modeling karena mencegah regresi OLS (ordinary smaller square)), Misalnya, data seringkali harus disebarluaskan secara multivariat, dan tidak ada masalah multikolonisasi antar variabel okogenus.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

3.6.2 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau penjelasan variabel ilmu data dari rata-rata, standar deviasi, dan ilmu data. Standar deviasi Nilai

maksimum dan minimum menjelaskan distribusi data. Data yang paling tersebar menampilkan informasi seolah-olah menyebar. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk menafsirkan analisis deskriptif (Ghozali, 2018).

3.6.1.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen yaitu CG dalam hal ini hanya kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap variable dependen yaitu *Tax avoidance (Tax avoidance)*. Dalam penelitian ini model regresi dapat dikembangkan sebagai berikut :

$$ETR = \alpha + \beta_1 INST + \beta_2 MANJ + \beta_3 TH + \varepsilon$$

Dimana :

$ETR = Tax\ avoidance$

$\alpha =$ Konstanta

$\beta =$ Koefisien Regresi

$INST =$ Kepemilikan Institusional

$MANJ =$ Kepemilikan Manajerial

$TH =$ Tahun pandemi

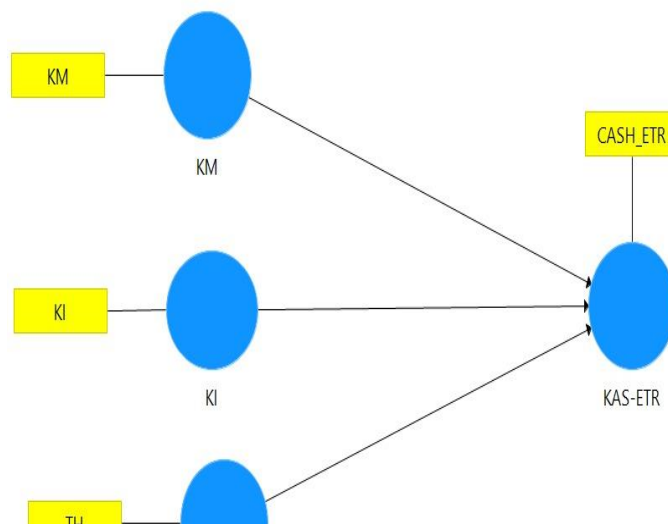
$\varepsilon =$ Error item

3.6.3 Uji Analisis Data

Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan struktural berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *SEM-Partial Least Square (PLS)*. Metode *Partial Least Square (PLS)* dijelaskan sebagai model persamaan struktural berbasis *variance (PLS)* mampu

menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*) (Ghozali, 2014).

Partial Least Square (PLS) selain dapat mengkonfirmasi teori, namun juga untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Selain itu PLS juga digunakan untuk mengkonfirmasi teori, sehingga dalam penelitian yang berbasis prediksi PLS lebih cocok untuk menganalisis data. *Partial Least Square* (PLS) juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. *Partial Least Square* (PLS) dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan formatif. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh SEM yang berbasis kovarian karena akan menjadi *unidentified model*. Pemilihan metode *Partial Least Square* (PLS) didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penelitian ini terdapat 4 variabel laten yang dibentuk dengan indikator refleksif dan variabel diukur dengan pendekatan refleksif *second order factor*. Model refleksif mengasumsikan bahwa konstruk atau variabel laten mempengaruhi indikator, dimana arah hubungan kausalitas dari konstruk ke indikator atau manifest sehingga diperlukan konfirmasi atas hubungan antar variabel laten (Ghozali, 2014)



Gambar 3. 1 Model Empiris

3.6.3 Model Pengukuran atau Outer Model

3.6.3.1 Uji Validitas

Pemeriksaan validasi digunakan untuk menilai validitas kueri. Kuesioner sangat berharga jika pertanyaan kuesioner dapat mengungkapkan apa yang harus dilakukan kuesioner. Pemeriksaan konfirmasi diterapkan pada semua daftar pertanyaan yang terkandung dalam setiap variabel. Tes ini memiliki beberapa tahap, termasuk efektivitas konvergen. Varians rata-rata negatif (AVE) dan uji validitas diskriminasi.

a. *Content Validity*

Validitas kuesioner dapat diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang banyak digunakan oleh peneliti. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil studi literatur yang dimodifikasi sesuai kebutuhan untuk menghindari tren responden dengan kebutuhan tertentu.

b. *Convergent Validity*

Ukuran konvergensi ini menunjukkan apakah setiap elemen pertanyaan mengukur kesamaan variabel. Oleh karena itu, hanya unsur pertanyaan yang sangat penting, yaitu lebih dari dua kali standar. kesalahan Untuk mengukur faktor

pertanyaan variabel penelitian. Akurasi konvergensi memuaskan jika, untuk semua variabel, nilai AVE lebih besar dari 0,5 dan nilai beban setiap item lebih besar dari 0,5. (Gonzali, 2014).

c. *Average Variance Extrated (AVE)*

Pemeriksaan validitas ini digunakan untuk menilai validitas unsur-unsur pertanyaan dengan menggunakan Penghapusan varians rata-rata AVE adalah persentase rata-rata varians. halangi AVE) antara faktor pertanyaan variabel atau indikator, yang merupakan ringkasan indikator konvergen. Untuk persyaratan yang baik, jika AVE dari setiap komponen pertanyaan lebih besar dari 0,5 (Ghozali, 2014).

d. *Discriminant Validity*

Tes validasi ini menjelaskan apakah kedua variabel tersebut benar-benar berbeda. Pemeriksaan validitas diskriminasi dapat dilakukan jika nilai korelasi variabel untuk variabel tersebut lebih besar dari nilai korelasi semua variabel lainnya. Selain itu, cara lain untuk lulus uji validitas discirimins dapat ditemukan di pemuatan silang, Jika nilai Pemuatan silang Setiap elemen dari elemen perintah variabel memiliki korelasi elemen perintah dengan variabel lainnya (Ghozali, 2014).

3.6.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi metrik dalam mengukur suatu konsep atau untuk mengukur kesesuaian responden dalam menanggapi pernyataan yang dibuat dalam kuesioner atau alat penelitian. Uji tuntas dapat

dilakukan dengan keandalan keseluruhan yang bervariasi, dianggap dapat diandalkan ketika ada nilai majemuk.

Keandalan $\geq 0,7$ (Sekaran, 2014).

3.6.4 Model Struktural atau Inner Model

Pengujian inner model atau model struktural dengan PLS dimulai dengan melihat nilai *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif.

3.6.5 Pengujian Hipotesis

Semua hipotesis diuji, diikuti oleh Kotak terkecil parsial (Silahkan). Kotak terkecil parsial (PLS) adalah metode analitik kuat Karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. (Ghozali, 2018) Metode PLS memungkinkan model untuk diuji menggunakan hipotesis: data tidak memerlukan distribusi normal, skalanya bisa kecil, urutan atau skala siklus, jumlah sampel tidak harus besar, indeks tidak perlu dalam bentuk refleksi. (mungkin indikator, refleksi, dan model) dan model tersebut tidak didasarkan pada teori. (Gonzali, 2014).

Uji-T adalah uji terpisah tentang makna variabel konstanta dan independen dalam persamaan dan apakah itu mempengaruhi nilai variabel yang sesuai. (Gonzali, 2014) Jika nilai *t* dihitung, tabel hipotesis kosong < ditolak (koefisien regresi signifikan) dan hipotesis alternatif dalam penelitian diterima pada tingkat ambang batas. 5% (lima persen) Persentase pengaruh semua variabel independen pada nilai variabel dependen, yang ditentukan oleh besarnya faktor deterministik.

Persegi R (R2) dari 1 ke nol, di mana Persegi R (R2) memiliki dampak yang hampir besar. (Gonzali, 2014).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menganalisis dampak kepemilikan dan tata kelola kelembagaan terhadap penghindaran pajak. Pada bab ini, kita akan membahas prosedur dan pemrosesan manajemen data, dan kemudian menganalisis dampak kepemilikan organisasi dan kepemilikan eksekutif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan metode pemilihan target untuk 220 perusahaan, hanya 29 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel yang digunakan sebagai sampel dalam survei dan akan digunakan sebagai sumber analisis data. Data yang diperoleh sesuai dengan kriteria pengambilan sampel dan proses seleksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Seleksi Sampel

Keterangan	Jumlah
Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	220
Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (target sampling):	
1. Perseroan tidak masuk dalam daftar BEI secara berurutan pada tahun 2019-2023.	-39
2. Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan untuk tahun 2019-2023	-23
3. Perusahaan tidak memiliki hak manajemen.	-84
4. Perusahaan tidak memiliki kepemilikan atas organisasi.	-6
5. Perusahaan nirlaba	-39
Sampel Penelitian	29
Total Sampel (n x periode penelitian) (29 x 5 tahun)	145

Sumber: data yang diolah,2024

4.2 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang menguji pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* (*tax avoidance*).

4.2.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dari penelitian ini adalah data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Maksimum, rata-rata, dan standar deviasi data penelitian Variabel independen yang digunakan dalam artikel ini adalah kepemilikan organisasi (X1), kepemilikan manajemen (X2), sedangkan *tax avoidance* dihitung berdasarkan variabel berdasarkan cash offensive (Y). Berikut adalah statistik deskriptif untuk setiap variabel:

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI	145	.0139	.9868	.591102	.2363599
KM	145	.0002	.8000	.179154	.2239111
CETR	145	.0482	8.4498	.538926	1.0395939
Valid N (listwise)	145				

Sumber: data yang diolah, 2024

Data deskriptif kepemilikan institusional (CI) menunjukkan nilai setinggi 0,0139, seperti Barito Pacific Tbk pada tahun 2023. Nilai rata-rata kepemilikan organisasi adalah 0,591 dengan standar deviasi 0,236, yang berarti bahwa standar kurang dari rata-rata, sehingga dapat ditentukan bahwa hasilnya berarti bahwa standar kurang dari rata-rata, sehingga dapat menunjukkan bahwa hasilnya berarti bahwa standar kurang dari rata-rata, Sehingga dapat ditunjukkan bahwa hasilnya

cukup baik, karena perbedaannya mencerminkan varians yang sangat besar. Oleh karena itu, difusi dan tampilan adalah normal dan tidak menyesatkan.

Descriptive Control Ownership (KM) menunjukkan bahwa nilai terendah 0,0002 adalah Indofood Sukses Makmur Tbk, sedangkan nilai tertinggi 0,8000 adalah Mulia Boga Raya Tbk pada tahun 2019. Ini karena prevalensi mencerminkan perubahan besar. Oleh karena itu, difusi dan tampilan adalah normal dan tidak menyesatkan.

Berdasarkan hasil *tax avoidance* (CETR) perusahaan manufaktur pada periode 2019 hingga 2023, nilai *tax avoidance* minimum pada tahun 2020 di Bhoppro Tbk adalah 0,0482, pada tahun 2023 nilai *tax avoidance* maksimum Alkindo Naratama Tbk adalah 8,449, rata-rata CETR adalah 0,538 dan standar deviasi adalah 1,039, berarti bahwa standar deviasi berada di atas rata-rata, sehingga dapat ditentukan bahwa hasilnya kurang optimal, Karena perbedaannya mencerminkan perbedaan yang sangat besar. Oleh karena itu, difusi dan tampilan adalah normal dan tidak menyesatkan.

4.3 Evaluasi Model Pengukuran

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis moderasi menggunakan SmartPLS, yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel kepemilikan organisasi dan kepemilikan eksekutif mempengaruhi penghindaran pajak.

Analisis data dilakukan dengan mengimpor semua data dari laporan keuangan dan memeriksa keakuratan konvergensi. Model evaluasi pengukuran PLS didasarkan pada pengukuran prediktif dengan sifat nonparametrik. Model

reflektometer indikator atau model eksternal dinilai dari akurasi konvergensi dan diferensiasi indikator dan keandalan kompleks unit indikator (Sholekhah, 2018).

Akurasi konvergensi model reflektometri diperkirakan berdasarkan hubungan antara titik elemen/komponen dan titik desain yang dihitung oleh PLS

Tabel 4. 3 Outer Loadings
(Measurement Model)

	KAS-ETR	KI	KM	TH
CASH_ETR	1.000			
KI		1.000		
KM			1.000	
TH				1.000

Sumber: data yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian di atas, faktor beban dari setiap hubungan antara indeks dan struktur memiliki nilai variabel. Dan dapat dikatakan bahwa nilai indikator berada di atas 0,70, sehingga semua indikator akurat dan tidak kurang dari 0,70. Langkah selanjutnya adalah tes kedua dengan keandalan sintetis dan nilai alpha kronbach:

Tabel 4. 4 Composite Reliability

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
KAS-ETR	1.000	1.000	1.000	1.000
KI	1.000	1.000	1.000	1.000
KM	1.000	1.000	1.000	1.000
TH	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber: data yang diolah, 2024

Di antara nilai-nilai keandalan semua struktur eksternal, yang eksternal dapat diandalkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusi,

kepemilikan manajemen, dan *tax avoidance* memiliki akurasi dan keandalan yang baik.

Dari nilai Cronbachs-alpha dari semua struktur eksternal. Secara lahiriah, hal ini sangat masuk akal, karena nilainya lebih tinggi dari 0,70, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.2 di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan organisasi, kepemilikan manajemen, dan *tax avoidance* memiliki akurasi dan keandalan yang baik.

4.4 Model Struktural (*Inner Model*)

4.4.1 Penilaian *R-Squares*

Saat mengevaluasi model struktural dengan PLS, *RSquares* dari setiap variabel laten eksternal dievaluasi sebagai kekuatan prediksi model struktural. Perubahan nilai kuadrat R dapat digunakan untuk menggambarkan efek variabel laten eksternal tertentu pada variabel laten eksternal, terlepas dari apakah mereka memiliki efek yang signifikan atau tidak. Nilai R kuadrat 0,75, 0, 50, 0,25 dapat disimpulkan bahwa modelnya kuat, sedang dan lemah. Hasil kuadrat R PLS mencerminkan pengukuran varians struktural yang dijelaskan dalam model. Berikut cara menghitung nilai *RSquares* dari hasil pemrosesan SmartPls 3.0 :

Tabel 4. 5 *R- Square*

	R Square	R Square Adjusted
KAS-ETR	0.024	0.001

Sumber: data yang diolah, 2024

Menurut hasil penelitian, R square adalah 0,024 atau 2,4%, yang berarti bahwa *tax avoidance* dapat dijelaskan dengan variabel 2,4% dari kepemilikan

organisasi dan kepemilikan eksekutif, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor selain model penelitian.

4.5 Uji Hipotesis

Pada artikel ini, uji hipotesis disajikan dalam tabel koefisien jalur yang digunakan untuk memeriksa apakah hipotesis studi dapat diterima atau dibantah. Tujuan dari model eksternal adalah untuk memprediksi hubungan kausal antara variabel eksperimental atau hipotesis, yang menunjukkan betapa pentingnya mereka. Pengujian hipotesis antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) dilakukan dengan menggunakan metode bootstrap. Pengujian dilakukan dengan menguji tiga hal: hasil model eksternal, yang dinyatakan dengan nilai TStatistic SmartPLS, harus lebih tinggi dari hasil 1,96 untuk hipotesis bilateral dan lebih tinggi dari 1,64 untuk hipotesis tunggal. Kedua, jika nilai-p uji hipotesis kurang dari 0,05, hipotesis diterima. Ketiga, jika nilai sampel awal menunjukkan sinyal positif, hipotesis memiliki efek positif, dan jika sinyal negatif diberikan, hipotesis tersebut memiliki efek negatif

Tabel 4. 6 Outout Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
KI -> KAS-ETR	0.042	0.051	0.103	0.406	0.685
KM -> KAS-ETR	0.051	0.054	0.091	0.555	0.579
TH -> KAS-ETR	-0.146	-0.152	0.063	2.311	0.021

Sumber: data yang diolah, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari tabel di atas, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rasio antara variabel kepemilikan organisasi (X1) dan *tax avoidance* (Y) untuk nilai t dihitung sebagai $0,406 < 1,96$, dan nilai signifikannya adalah $0,685 >$

Hubungan antara kepemilikan eksekutif (X2) dan *tax avoidance* (Y) berasal dari nilai t yang dihitung sebesar $0,555 < 1,96$ dan nilai signifikan sebesar $0,579$, sehingga menyimpulkan bahwa variabel kepemilikan eksekutif tidak mempengaruhi *tax avoidance* karena variabel kepemilikan manajemen memiliki nilai signifikan sebesar $0,579 > 0,05$, Jadi hipotesis kedua dari penelitian ini, yang menyatakan bahwa "kepemilikan eksekutif mempengaruhi penghindaran pajak," **ditolak.**

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Hasil dari beberapa studi regresi linier menunjukkan bahwa kepemilikan kelembagaan tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan kelembagaan tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Adanya struktur kepemilikan institusional menunjukkan bahwa ada tekanan kelembagaan terhadap tata kelola perusahaan untuk menerapkan kebijakan perpajakan yang proaktif dalam rangka memaksimalkan keuntungan investor institusional.

Perusahaan bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya, sehingga pemilik organisasi didorong untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Pengungkapan sukarela telah mengungkapkan bahwa perusahaan dengan lebih banyak kepemilikan institusional lebih mungkin untuk keluar dari publik.

Memprediksi dan memprediksi hal-hal yang lebih spesifik, akurat, dan optimis (Khurana & Moser, 2011).

Menurut Jensen & Meckling, 1976) (Sujoko & Yuniati, 2016), ia menjelaskan bahwa hasil penelitian tidak mendukung teori keagenan karena teori keagenan memisahkan pemilik dan pengelola. Kepemilikan institusional, yang berfungsi sebagai bagian pengendali dari suatu korporasi, mungkin tidak dapat memberikan kontrol yang memadai atas kegiatan manajemen peluang untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak. Ini mungkin karena kurangnya kualitas sumber daya pemilik organisasi. Pemegang saham institusional tidak sepenuhnya menggunakan kekuasaan mereka untuk memantau dan mengendalikan keputusan manajemen, sehingga *tax avoidance* tetap ada.

Selain alasan di atas, ada beberapa alasan untuk mencurigai bahwa tingkat kepemilikan organisasi tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Pertama-tama, kepemilikan organisasi adalah persentase saham yang dimiliki oleh organisasi yang bukan merupakan pemegang saham komite perusahaan, di mana pemilik organisasi berpartisipasi dalam manajemen dan kegiatan perusahaan.

Kedua, kepemilikan institusional menganggap bahwa itu meningkatkan kekayaan, khususnya keuntungan atau keuntungan dari perusahaan, bahwa setiap kegiatan yang merugikan perusahaan melibatkan pajak positif yang dilakukan oleh perusahaan. Dampak terhadap langkah-langkah penghindaran pajak

Ketiga, pemilik organisasi kurang tertarik dengan citra perusahaan, asalkan dapat meningkatkan kebahagiaan mereka, terlepas dari perilaku manajer dalam pengambilan keputusan, terutama dalam urusan perpajakan, seperti kegiatan.

Penelitian ini mendukung penelitian Haloho, (2021) dan (Adhivinna, 2017) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.6.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, terlihat bahwa kepemilikan eksekutif tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Artinya, pada perusahaan manufaktur pada periode 2019 hingga 2023, dapat dikatakan bahwa manajemen tidak memainkan peran dan kewenangan besar dalam mengambil keputusan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jumlah saham yang dimiliki oleh pengelola perusahaan batubara, perusahaan tidak ikut serta dalam penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan eksekutif tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Selain itu, ada klaim bahwa tidak ada pengaruh terhadap penghindaran pajak, karena manajemen lebih tertarik pada kegiatan perusahaan sehingga dapat berfungsi secara efisien dan efektif. Hasilnya tidak cocok untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, kepemilikan eksekutif tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian sesuai dengan (Situmorang & Anastasia, 2021), yaitu kepemilikan eksekutif tidak mempengaruhi penghindaran pajak..

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Berdasarkan hasil analisis, pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa besar-kecilnya kepemilikan oleh institusi tidak akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.
2. Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa pihak manajerial tidak memiliki peran dan wewenang yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Oleh karena itu, struktur kepemilikan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan yang termasuk dalam suatu organisasi atau bertindak sebagai bagian dari perusahaan bukan merupakan bagian dari strategi penghindaran pajak perusahaan, atau juga terjadi karena penghindaran pajak terkait perencanaan laba perusahaan, dll.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, penelitian tersebut memiliki keterbatasan, yaitu dalam penelitian ini hanya perusahaan manufaktur yang tercatat

di BEI yang akan digunakan pada periode 2019 hingga 2023, sehingga tidak dapat dijadikan dasar kesimpulan umum di industri lain dan pada waktu yang berbeda.

5.3 Saran

1. Studi ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Ada batasan dalam artikel ini. Oleh karena itu, penulis memberikan saran tentang cara mengatasi batasan yang ada. Rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:
2. Nilai R-kuadrat dalam penelitian ini hanya 0,024 atau 2,4%, dan sisanya 97,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor selain yang diteliti dalam penelitian ini. Kompensasi atas kerugian anggaran, hubungan politik dan variabel lain yang belum dipelajari secara menyeluruh atau mempengaruhi penghindaran pajak oleh faktor yang kuat.
3. Peneliti masa depan diharapkan dapat mengeksplorasi area penelitian dengan potensi penghindaran pajak yang tinggi, seperti perusahaan multinasional (MNC) atau industri lain seperti real estat dan real estate.
4. Untuk peneliti selanjutnya, semoga mereka dapat memperhatikan rumus yang digunakan untuk mengukur variabel. Pemberian pengetahuan akuntansi keuangan diharapkan dapat berdampak pada penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>
- Anita Wijayanti, Endang Masitoh, S. M. (2018). (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2017). Tren *Tax avoidance* Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Badan Penerbit – UNDIP.
- Haloho, S. F. R. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 705–719. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/1147>
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Lucia, L., & Panggabean, R. R. (2018). the Effect of Firm'S Characteristic and Corporate Governance To Sustainability Report Disclosure. *Social Economics and Ecology International Journal (SEEIJ)*, 2(1), 18–28. <https://doi.org/10.31397/seeij.v2i1.15>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap *Tax avoidance* (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Prastiyanti, S., & Mahardhika, A. S. (2022). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA), 4(4), 513–526. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i4.136>

- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Rinaldi, & Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013). *Junral Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SENMA)*, 8(2), 472–483. <http://fe.unp.ac.id/>
- Sari, A. Y., Kinasih, H. W., Aditya, D., Pratiwi1, N. P. D., Mahaputra2, I. N. K. A., & Sudiartana3, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 1609–1617.
- Sekaran, U. (2014). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis (Research Methods for Business)* (4th ed.). Salemba Empat.
- Situmorang, B., & Anastasia, V. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur. *Realible Accounting Journal*, 1(1), 20–35. <https://doi.org/10.36352/raj.v1i1.132>
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Winarsih, E. S. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan dalam Membayar Pajak. *Magistra*, 91, 8–20.